

# BERKEMBANG DENGAN BELAJAR

---

LAPORAN TAHUNAN 2022





Happy People, Many Fish®

### Laporan Tahunan 2022 MDPI

© 2023 MDPI. Hak Cipta Dilindungi.

### Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)

Ruko Istana Regency Blok S No.7  
Jl. Bypass Ngurah Rai, Pesanggaran  
Denpasar 80223, Bali, Indonesia  
Phone: (+62 361) 471 9020  
Email: [info@mdpi.or.id](mailto:info@mdpi.or.id)  
[www.mdpi.or.id](http://www.mdpi.or.id)

-  Masyarakat Dan Perikanan Indonesia
-  @mdpi\_foundation
-  @MDPIIndonesia
-  Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
-  Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia

### Foto

- © Antoine Lemaire, 2022 (halaman sampul, 38)
- © Rifky Anugrah, 2022 (halaman 8 bawah, 9, 12, 13)



# Daftar Isi

---

- 04 | Sambutan Dewan Pembina
- 05 | Tentang MDPI
- 06 | Kata Pengantar Direktur
- 07 | Highlights
- 10 | Wilayah Kerja MDPI
- 12 | Pengelolaan Efektif untuk Tuna Tropis
- 14 | Rumpon Legal Milik Koperasi Nelayan
- 16 | Pertemuan Regional IV KPBP Tuna
- 18 | Peningkatan Kapasitas Nelayan & Kualitas Produk
- 19 | Perluasan Wilayah Kerja
- 20 | Jangkauan dan Capaian MDPI
- 22 | Literasi Finansial
- 24 | Peran Perempuan Tingkatkan Ekonomi Rumah Tangga
- 26 | Pengelolaan Sampah Wujudkan Perikanan Berkelanjutan
- 28 | Peningkatan Kapasitas Penggerak Perubahan Lokal
- 30 | Masyarakat Pesisir Wujudkan Perikanan Berkelanjutan
- 32 | Penggerak Ekosistem Perikanan
- 34 | Meet the Team
- 36 | Peningkatan Kapasitas Internal
- 38 | Menuju MDPI Satu Dekade
- 39 | Operasional & Keuangan

“ MDPI berkembang dengan belajar dari implementasi program, beberapa di antaranya telah dilaksanakan dengan prinsip peningkatan kinerja berkesinambungan.

**Budy Wiryawan**

Ketua Dewan Pembina MDPI



## SAMBUTAN DEWAN PEMBINA

MDPI adalah lembaga swadaya masyarakat pertama yang bergerak di bidang pengelolaan perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. Organisasi nirlaba ini didirikan pada tahun 2013 untuk mendorong kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan komunitas nelayan dan sumber daya perikanan di seluruh Indonesia. Mimpi besar kami adalah pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia akan menjadi mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan program kerja, MDPI menerapkan sejumlah prinsip tata kelola organisasi yang baik, mencakup unsur akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi kepada para pemangku kepentingan, dari tingkat masyarakat lokal, pemerintah daerah, pemerintah pusat khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, industri perikanan, juga para donor di tingkat nasional dan internasional.

Menyambut ulang tahun MDPI ke-10 di tahun 2023, program kerja MDPI telah menghasilkan capaian yang berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. Sejak awal berdiri, kegiatan yang dijalankan diharapkan sekaligus mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola perikanan secara lebih efektif, khususnya dengan senantiasa mendorong kolaborasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Hingga saat ini, inisiatif kolaborasi telah terbentuk di 8 provinsi bagian tengah dan timur Indonesia. Namun, kolaborasi bukanlah target kinerja yang dimenangkan dan diunggulkan, melainkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan perikanan berkelanjutan yang menjadi tolok ukur kesuksesan MDPI, sesuai dengan motto “*Happy people, many fish*” yang kami pegang.

MDPI berkembang dengan belajar dari implementasi program, beberapa di antaranya dilaksanakan dengan prinsip peningkatan kinerja berkesinambungan. Praktik baik terkait pengelolaan perikanan telah dijalankan sejak tahun 2014 melalui implementasi sertifikasi Fair Trade USA nelayan tuna *handline*. Proses ini terus berlanjut hingga sertifikasi Marine Stewardship Council didapatkan pada tahun 2020, sertifikasi pertama di dunia untuk perikanan *handline* skala kecil. Pada tahun 2022, sistem pendataan perikanan dibangun bersama mitra untuk penyusunan *Harvest Strategy Tuna* di *Indonesian Archipelagic Waters* (WPP 713, 714 dan 715). Proses pengembangan *Harvest Strategy Tuna* adalah contoh nyata terbentuknya hubungan sains-kebijakan (*science-policy interface*), di mana MDPI turut aktif mendukung ketersediaan data melalui sistem pendataan yang diakui dan absah.

Pada tahun 2022 MDPI memelopori penerapan kebijakan regulasi rumpon yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tahun 2021, dengan memfasilitasi pendaftaran rumpon legal pertama untuk perikanan skala kecil. Praktik baik pengelolaan perikanan ke depannya akan terus dikembangkan, dengan dukungan mitra dan para donor, juga peningkatan kapasitas organisasi melalui intervensi perbaikan praktik sosial internal menuju perubahan tata kelola yang lebih baik, untuk mendukung pembangunan perikanan Indonesia sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan dan ekonomi bagi generasi mendatang.

Atas nama Dewan Pembina, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra kerja, jajaran Dewan Pengawas, Pengurus, Manajemen, dan para donor atas dukungannya.

**Budy Wiryawan**



## VISI

Mata pencaharian yang berkelanjutan di masyarakat pesisir dan pengelolaan perikanan yang efektif di Indonesia.

## MISI

Memberdayakan masyarakat pesisir di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan perikanan, memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan keberlanjutan mata pencaharian penangkapan ikan.

**MDPI didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan untuk mendorong kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan sumber daya perikanan di seluruh Indonesia.**

### Happy People, Many Fish®

Organisasi kami dibentuk atas dasar kepercayaan yang sederhana: bahwa masyarakat perikanan yang berdaya dan terjamin secara finansial adalah kunci dalam mencapai perikanan berkelanjutan. Kami bekerja di sektor perikanan skala kecil demi mendorong rantai pasok perikanan yang berkelanjutan, adil dan dapat dilacak. MDPI bertujuan untuk mendapatkan hasil jangka panjang yang nyata dan dapat bertahan dalam kelompok masyarakat yang kami libatkan.

“ Menyongsong dekade pertama MDPI di tahun 2023, kami tetap berkomitmen demi misi keberlanjutan selagi menyambut peluang dan tantangan yang menanti di masa depan.

**Yasmine Simbolon**  
Direktur MDPI



## KATA PENGANTAR

Dengan berlalunya tahun 2022, kami bersyukur dapat melampauinya dengan bertumbuh, mengukir pencapaian, dan berusaha melewati banyak rintangan. Kami memiliki lokasi kerja di Bali dengan spesies baru: tuna neritik. Di saat yang bersamaan, kami pun membuka wilayah pendataan baru di Kore, Nusa Tenggara Barat, dan masuk provinsi baru: Gorontalo. Masih dengan semangat yang sama, kami menajamkan analisis pendataan untuk pengelolaan perikanan di Indonesia.

Kerja MDPI dalam membangun kapasitas masyarakat pesisir, memupuk kolaborasi dengan para pemangku kepentingan perikanan, dan mendukung penghidupan pesisir yang berkelanjutan terus berlanjut. Beberapa hal yang dapat dicatat: terlibatnya 75 Penggerak Perubahan Perikanan, 770 nelayan dan istri nelayan dalam pelatihan literasi keuangan, pengembangan koperasi nelayan dan kader lokal pesisir, serta diversifikasi mata pencaharian yang jauh melibatkan perempuan pesisir demi memperkuat ekonomi.

Kami juga menerbitkan sebuah buku panduan berisi koleksi cerita praktik terbaik yang menunjukkan bagaimana kegiatan pengembangan masyarakat pesisir dampingan MDPI dapat mengarah pada perubahan perilaku. Kami juga berhasil mengadakan berbagai kegiatan penyadartahuan isu perikanan berkelanjutan, termasuk Hari Perikanan Sedunia 2022 yang diikuti lebih dari 1.000 peserta.

Komite Pengelola Bersama Perikanan terus aktif berjalan di enam provinsi. Sekitar 900 peserta mengikuti 12 pertemuan provinsi dan satu pertemuan regional. Pertemuan-pertemuan ini digunakan sebagai wadah bagi seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah

pusat sampai dengan nelayan skala kecil untuk saling bicara, memahami dan mengerti, serta berkesempatan untuk duduk bersama di satu ruangan.

Kami pun membarui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menguatkan sinergitas bersama. Kami bertujuan untuk terlibat aktif dalam pengembangan *Harvest Strategy* (Strategi Pemanfaatan) di perairan Indonesia dan dalam diskusi kebijakan pengelolaan perikanan negara.

Tahun 2022 merupakan pencapaian terbesar MDPI bersama nelayan dampingan di Pulau Bisa, dengan mendaftarkan rumpon legal pertama untuk nelayan skala kecil di Maluku Utara, bahkan di Indonesia. Dalam hal perbaikan perikanan, kami juga menginisiasi percobaan penggunaan *e-logbook* bersama 24 nelayan, memfasilitasi pendaftaran legalitas kapal 600 nelayan, dan membangun kapasitas mereka dalam lingkup perikanan skala kecil.

Kami berterima kasih kepada seluruh donor, mitra, dan keluarga besar MDPI yang telah mengambil bagian dalam perjalanan ini demi perikanan berkelanjutan. Menyongsong dekade pertama MDPI di tahun 2023, kami tetap berkomitmen demi misi keberlanjutan selagi menyambut peluang dan tantangan yang menanti di masa depan.

Mewakili MDPI, saya berharap agar tetap dapat bekerja sama dengan Anda semua untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

**Jaz**



# HIGHLIGHTS

## **Pendaftaran rumpon pertama di Maluku Utara**

Nelayan binaan MDPI yang tergabung dalam Koperasi Komite Tuna Bisa Mandioli mengambil langkah untuk mengurus Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) pertama untuk nelayan skala kecil di Provinsi Maluku Utara, bahkan di Indonesia. Mereka menyadari bahwa regulasi ini penting untuk mengatur keserasian ruang laut dan dampak dari perikanan tangkap, sehingga perlu diatur untuk keberlanjutan sumber daya perikanan. Selengkapnya di halaman 14.

.....

## **Perpanjangan Memorandum of Understanding dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Sejak 2019 MDPI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Perikanan (Ditjen PDSPKP) di bawah KKP dalam menjalankan beberapa rencana aksi terkait pengelolaan perikanan skala kecil. Di tahun 2022, MDPI dan Ditjen PDSPKP memfokuskan kegiatan pada 4 isu besar, yaitu: kualitas ikan, kesejahteraan nelayan/karyawan industri perikanan, keberlanjutan sumber daya ikan dan ketelusuran produk perikanan. Melalui pembaharuan Perjanjian Kerja Sama dengan KKP, MDPI turut mensinergikan kegiatan dan memperoleh bimbingan lebih lanjut.

.....

## **Perluasan jangkauan dampingan: Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo**

Di tahun 2022, MDPI mengambil langkah untuk memperluas jangkauan program dampingan, khususnya di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Bali, juga menambah satu wilayah dampingan di Provinsi NTB, bersama masyarakat pesisir di Kore. Penilaian potensi lokasi dijalankan selama Agustus-September berdasarkan beberapa aspek antara lain sosial ekonomi, identifikasi rantai pasok, pendataan perikanan, hingga informasi pendukung operasional. Dari hasil penilaian, Kota Gorontalo dan Kabupaten Karangasem merupakan wilayah penting untuk menjadi lokasi pendataan ikan dan pengembangan kapasitas nelayan serta masyarakat pesisir sekitar. Selengkapnya di halaman 19.



## Pertemuan Regional Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna IV

Pertemuan Regional Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Tuna yang keempat diselenggarakan di Bali pada Juli 2022 dengan menghadirkan perwakilan rantai pasok perikanan skala kecil termasuk para nelayan, pemerintah daerah dan pusat, *supplier*, industri perikanan, akademisi, organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga mitra kerja lainnya dari 8 provinsi di bagian timur dan tengah Indonesia. Sebagai salah satu langkah penerapan pengelolaan perikanan berbasis partisipasi, pertemuan ini menjadi wadah berbagi informasi seputar tantangan, peluang dan sosialisasi kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Selengkapnya di halaman 16.

## Dialog *Harvest Strategy* antara Indonesia dan Filipina

Dalam upaya berkontribusi pada pengelolaan berkelanjutan untuk perikanan tuna sirip kuning, perwakilan dari pemerintah Indonesia dan Filipina bertemu untuk membahas kemungkinan kerja sama. Kedua negara mengakui pentingnya pertemuan ini sebagai sarana untuk mengeksplorasi langkah bersama demi meningkatkan efektivitas *Harvest Strategy* Tuna yang dikembangkan di wilayah perairan kedua negara.

## Uji coba *e-logbook* perikanan

MDPI turut mendampingi nelayan *handline* tuna skala kecil pada dalam proses penggunaan sistem *e-logbook* baru yang dikembangkan oleh KKP, sebuah format digital dari *logbook* manual yang mereka gunakan sebelumnya. Sejauh ini penggunaan *e-logbook* untuk merekam perjalanan memancing telah diuji coba pada 24 kapal di 2 provinsi yaitu Maluku dan Maluku Utara dan mendapat tanggapan positif dari para nelayan. Selengkapnya di halaman 13.



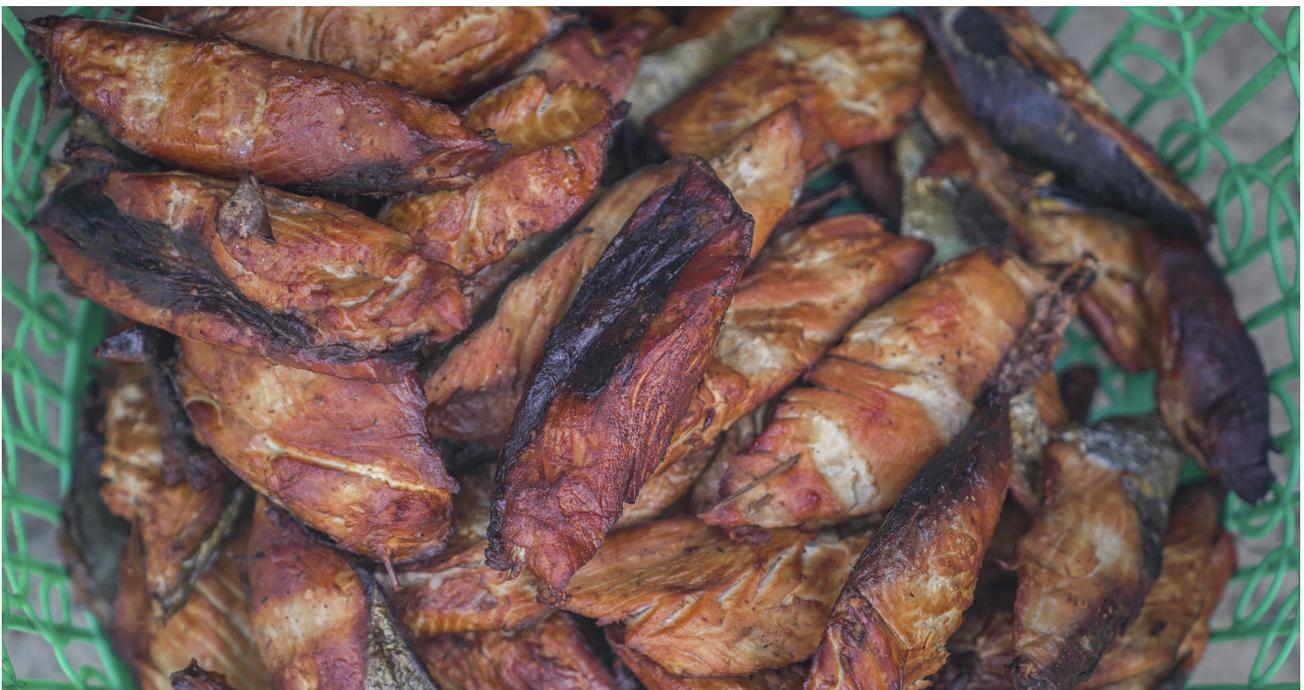
## Peningkatan kapasitas Penggerak Perubahan lokal

Selain pembinaan secara individu (one-on-one coaching) dan bimbingan dari tim MDPI, para champion binaan MDPI juga berkesempatan mengikuti kunjungan lapangan di luar daerah, yang juga menjadi kesempatan untuk saling berbagi best practice dengan sesama. Di tahun 2022 MDPI menyelenggarakan beberapa pertemuan champion di Bali dengan melibatkan 11 champion gabungan dari Kabupaten Lombok Timur, Bone dan Minahasa Utara.

---

## Ikan asap: upaya diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir

Di Kabupaten Bone, istri nelayan menjadi sorotan masyarakat karena telah berhasil mengembangkan koperasi di desa mereka. Setelah lebih dari setahun berjalan, Koperasi Kembali Muda Mandiri menyediakan kebutuhan untuk melaut serta modal untuk menunjang usaha rumah tangga, termasuk produksi ikan asap yang diprakarsai oleh para istri nelayan. Produk ikan asap akan dipasarkan di area Bone dan Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya di halaman 24.



## Pelatihan manajemen dan pembukuan digital untuk koperasi nelayan

MDPI berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi dalam manajemen koperasi, termasuk dalam penggunaan aplikasi yang dapat memfasilitasi pembukuan digital. Dalam pengelolaan usaha, koperasi biasanya menggunakan berbagai jenis buku untuk mencatat informasi, seperti stok barang, transaksi, kas dan barang masuk. Di akhir tahun 2022, MDPI melakukan pelatihan di beberapa wilayah kerja, berfokus pada penjelasan peran dan fungsi pengelola koperasi, menyiapkan laporan keuangan, menghitung sisa hasil usaha, membuat rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan, juga mempelajari cara melaporkan aktivitas dan keuangan koperasi di Rapat Anggota Tahunan sebagai pemenuhan kewajiban sebuah lembaga berbadan hukum.

---

## Kongres Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia

MDPI turut berpartisipasi dalam Kongres Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia untuk universitas negeri seluruh Indonesia dengan memberikan pemaparan mengenai kinerja MDPI dalam rangka menjaga perikanan berkelanjutan. Dihadiri oleh Direktur MDPI, Yasmine Simbolon, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kinerja MDPI sekaligus mengajak para pakar ekonomi dan bisnis untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

# MDPI ON THE MAP

## WILAYAH KERJA

MDPI memiliki pengalaman mendalam di bidang pengelolaan perikanan, khususnya di wilayah Indonesia timur, dengan implementasi kegiatan di 8 provinsi. Kami bekerja demi menjamin hasil jangka panjang yang nyata dan dapat bertahan dalam kelompok masyarakat yang kami libatkan, melalui beragam pelatihan hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.

### GORONTALO

- Fisheries Improvement Activities
- Fisheries Co-Management Committee

### SULAWESI SELATAN

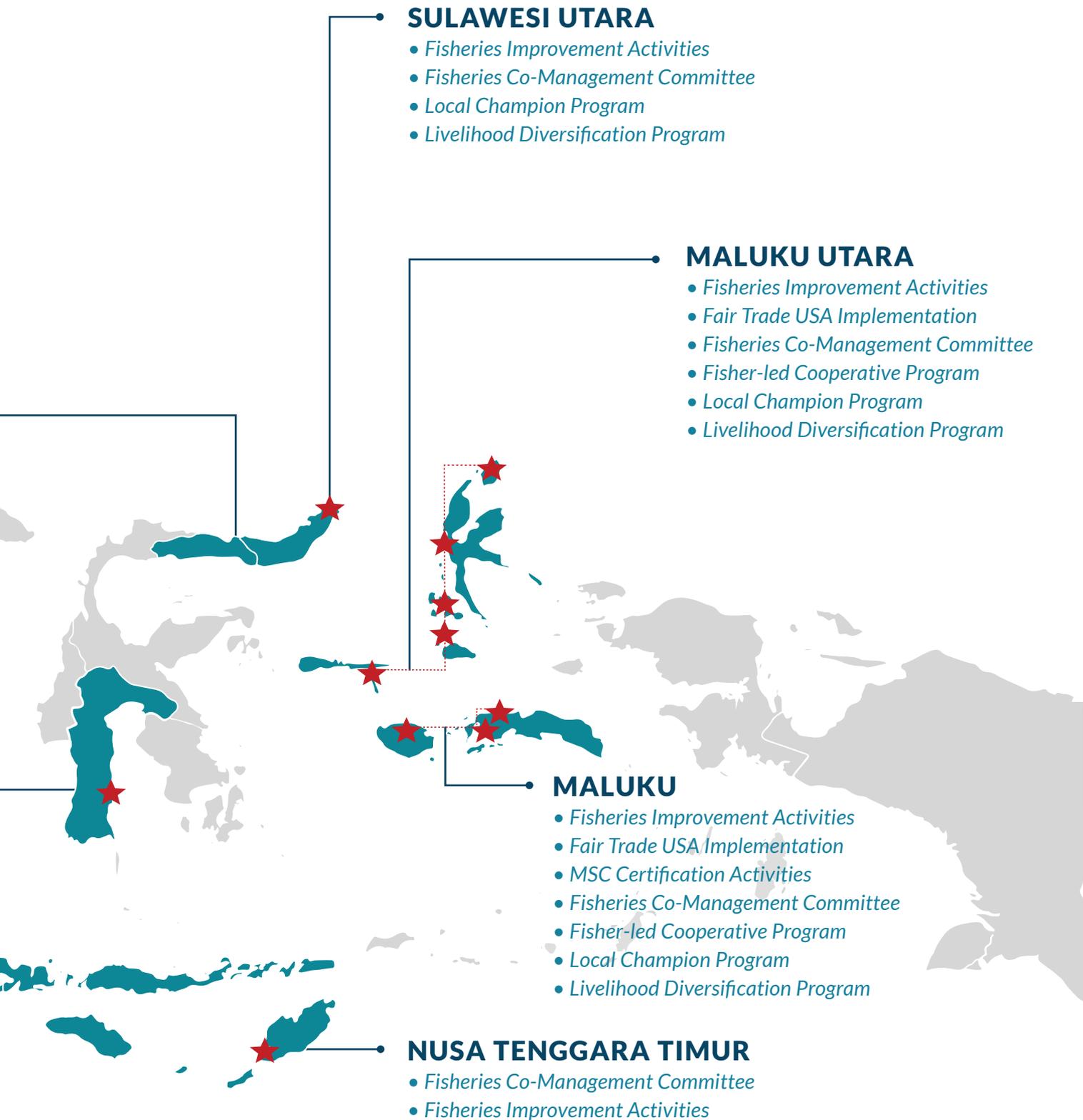
- Fisheries Improvement Activities
- Fisheries Co-Management Committee
- Fisher-led Cooperative Program
- Local Champion Program
- Livelihood Diversification Program

### BALI

- Head Office
- Fisheries Improvement Activities

### NUSA TENGGARA BARAT

- Fisheries Improvement Activities
- Fisheries Co-Management Committee
- Fisher-led Cooperative Program
- Local Champion Program



Kami menyadari pentingnya menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan yang lebih global. Memasuki tahun kesembilan, kami terus berkontribusi pada Sustainable Development Goals.



# HARVEST STRATEGY: PENGELOLAAN EFEKTIF UNTUK TUNA TROPIS DI INDONESIA

Sebagai penyedia data perikanan tuna *handline* skala kecil, MDPI aktif berperan dalam inisiasi dan persiapan implementasi *Harvest Strategy*, sebuah rencana pengelolaan sumber daya ikan dengan tujuan mengupayakan perikanan yang berkelanjutan, baik secara ekologi, ekonomi, juga sosial. MDPI rutin memfasilitasi beberapa lokakarya terkait data ilmiah perikanan tuna pancing ulur dan pertemuan dengan *stakeholder* tuna.



**Tahap inisiasi *Harvest Strategy* dimulai sejak 2014** dan melalui proses pengembangan hingga 2017, hingga akhirnya memasuki tahap implementasi sejak 2018; sebuah proses panjang yang dijalani bersama pemangku kepentingan perikanan. Framework for Harvest Strategies telah disusun oleh KKP bersama para pemangku kepentingan, termasuk MDPI, sebagai kerangka kerja yang telah disepakati, terlebih demi mewujudkan pengelolaan yang efektif. Lima tindakan pengelolaan prioritas disepakati untuk diimplementasi, yaitu: pembatasan penggunaan rumpon, penutupan daerah pemijahan dan penutupan sementara daerah tertentu, pengaturan jumlah hari penangkapan, pengaturan jumlah kapal penangkapan, dan penetapan hasil tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable*

*Catch*) pada tiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sepanjang 2022 MDPI turut bermitra dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan KKP untuk persiapan data dan proses integrasi ke dalam *Harvest Strategy*. Hasil dari berbagai lokakarya terkait persiapan data diserahkan kepada Western & Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) di bulan Juli 2022 sebagai dokumen pendukung proposal Indonesia tentang perikanan komersial lainnya. Selain itu, pertemuan *Technical Workshop Harvest Strategy Tropical Tuna in the Fisheries Management Area (FMA) 713, 714, 715* diadakan untuk membahas beberapa topik termasuk: sistem pemantauan kegiatan melaut; perhitungan kerangka standar survey; tindak lanjut berupa pertemuan teknis untuk revidi data.

## Dialog antara Indonesia & Filipina terkait pengelolaan lintas negara

Tuna merupakan spesies yang beruaya jauh hingga lintas perairan negara, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang efektif antar negara. Tuna menjadi komoditas penting bagi perekonomian berbagai negara Segitiga Terumbu Karang, tidak terlepas bagi Filipina dan Indonesia. Kedua negara aktif bertemu untuk membahas potensi kerja sama lintas batas untuk lebih memperkuat pengelolaan berkelanjutan tuna sirip kuning, sebuah kerja sama yang nantinya akan dijalankan melalui koordinasi dua negara tersebut dengan melibatkan peran serta Coral Triangle Program World Wildlife Fund (WWF) dan MDPI, terlebih khusus dalam upaya implementasi berdasarkan *Harvest Strategy* yang telah disepakati.

## PENCATATAN HASIL TANGKAP: UJI COBA E-LOGBOOK UNTUK NELAYAN

Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah pengumpulan data hasil tangkapan ikan. MDPI bekerja sama dengan nelayan, pemasok dan perusahaan pengolah dalam mengumpulkan sampel data secara rutin, baik di lokasi pendaratan (*port-side data sampling*) maupun melalui pengisian catatan perjalanan memancing para nelayan menggunakan *logbook*.

Sebuah *logbook* khusus disediakan bagi para nelayan untuk dapat mencatat jumlah tangkapan, jenis ikan yang ditangkap, jenis alat dan umpan yang digunakan, waktu yang dihabiskan di laut, jarak yang ditempuh dan lain sebagainya. Informasi ini awalnya ditulis oleh nelayan secara manual ke dalam *logbook*, kemudian melewati proses digitalisasi ke dalam I-Fish sebagai platform database tuna yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, pabrik dan *supplier*, guna mendukung penyediaan data. Selain itu, nelayan juga merekam interaksi dengan satwa *Endangered, Threatened and Protected* (ETP) sehingga turut membantu pemantauan spesies.

Sejak April 2022 MDPI mulai melakukan sosialisasi dan uji coba penggunaan sistem *e-logbook* baru yang dikembangkan oleh KKP, sebuah format digital dari *logbook* manual yang mereka gunakan sebelumnya. Uji coba dilakukan di beberapa lokasi kerja MDPI di Maluku dan Maluku Utara bersama 24 nelayan yang kini semakin aktif mencatat perjalanan memancing mereka.

Pencatatan dilakukan dengan merekam jumlah tangkapan, spesies, alat tangkap yang digunakan, jenis umpan yang digunakan, hingga interaksi dengan hewan ETP. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, MDPI melakukan penilaian terhadap pemahaman, pengalaman, konsistensi, hingga masukan nelayan dalam menggunakan *e-logbook*. Proses transformasi dari pencatatan manual di kertas ke pencatatan digital masih memerlukan penyesuaian mau pun integrasi yang lebih efektif, namun besar harapan proses ini dapat memberikan solusi dalam menjalankan kegiatan pengumpulan data perikanan yang lebih efektif, khususnya pada nelayan skala mikro.





# PERTAMA DI INDONESIA: RUMPON LEGAL MILIK KOPERASI NELAYAN

Penggunaan rumpun dapat mendukung kegiatan penangkapan ikan, namun saat ini masih banyak nelayan yang belum memiliki izin penempatan rumpun. Jumlahnya yang semakin menjamur dan tidak diregulasi membuat nelayan semakin terdesak, sehingga diperlukan penataan kembali untuk mengatur keserasian ruang laut. Menanggapi hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan demi menertibkan penggunaan rumpun, salah satunya melalui surat izin penempatan yang harus dikantongi sebelum memasang rumpun.

**Demi mendukung penerapan kebijakan regulasi** rumpun yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tahun 2021, sebuah forum *stakeholder* perikanan dibentuk untuk mendiskusikan pengalaman dalam proses pengurusan Surat Izin Pemasangan Rumpun (SIPR), mulai dari proses administrasi nelayan di lapangan hingga pengajuan melalui *Online Single Submission* (OSS).

Forum dukungan program pelaksanaan pengelolaan perikanan tentang perizinan rumpun diadakan pada akhir September 2022, dengan tujuan untuk saling berbagi informasi dan pengalaman antar pemangku kebijakan perikanan tuna tentang isu, tantangan dan pembelajaran seputar peraturan dan perizinan rumpun

di Indonesia. Tahap pendaftaran rumpun diawali dengan pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada Direktorat Pemanfaatan Ruang Laut di bawah KKP dan dilanjutkan dengan permohonan pengajuan SIPR kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (untuk rumpun yang ditempatkan di bawah 12 mil) atau kepada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (untuk rumpun yang ditempatkan di atas 12 mil). Pada kesempatan ini, MDPI berbagi pengalaman tentang proses pendaftaran rumpun bersama nelayan skala mikro di Maluku Utara.

Nelayan binaan MDPI yang tergabung dalam Koperasi Komite Tuna Bisa Mandioli, di Pulau Bisa Provinsi Maluku Utara, turut mengambil langkah mengurus SIPR. Mereka

menyadari bahwa regulasi ini penting untuk mengatur keserasian ruang laut dan dampak dari perikanan tangkap, sehingga perlu diatur untuk keberlanjutan sumber daya perikanan. Mengingat proses pengurusan perizinan rumpon merupakan hal baru dan perlu melewati banyak tahapan, MDPI memberikan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses perizinan penempatan rumpon, mulai dari pengurusan dokumen dasar PKKPRL hingga penyediaan data pendukung berupa data pasang surut, data arah dan kecepatan arus, tinggi gelombang, peta kedalaman laut, data sosial ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Perjuangan para nelayan Pulau Bisa



dan upaya kolaboratif bersama KKP dan pemerintah daerah membuahkan hasil terbitnya SIPR pertama untuk nelayan kecil di Maluku Utara, bahkan di Indonesia, pada Desember 2022 dan menjadi bukti bahwa pengurusan dokumen dapat dilakukan, asalkan dijalankan secara tuntas dan tertata. Rumpon yang dibangun melalui koperasi nelayan ini siap dipasang di perairan Pulau Bisa pada awal 2023. Pencapaian ini merupakan langkah signifikan dalam menerapkan perikanan legal dan berkelanjutan. Diharapkan juga bahwa inisiatif ini dapat menjadi inspirasi dan mendorong pemangku kepentingan lainnya untuk mendaftarkan rumpon mereka.

---

**Rumpon yang dipasang tanpa izin** kian meresahkan para nelayan kecil. Jumlah rumpon yang semakin menjamur sering kali menghalangi jalur pergerakan kapal dan semakin banyaknya kapal *purse seine* turut menyebabkan nelayan kecil kesulitan mendapatkan ikan dalam ukuran besar.

**Saya mulai mengalihkan target tangkapan tuna menjadi ikan karang agar tetap bisa menyambung hidup. Beberapa nelayan lainnya beralih profesi jadi tukang ojek dan mengadu nasib sebagai penambang emas.**

**Sarno La Jiwa**  
Nelayan tuna pancing ulur

---

**Rumpon legal pertama di Indonesia** milik Koperasi Komite Tuna Bisa Mandioli siap dipasang di perairan Maluku Utara. Rumpon perlu diregulasi untuk menjaga keserasian ruang laut dan tetap mendukung aktivitas penangkapan ikan para nelayan tuna yang mulai kesulitan mendapatkan ikan.

---

**Momentum keberhasilan** ini dirayakan dengan penyerahan dokumen SIPR secara langsung oleh Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku Utara kepada Sarno La Jiwa selaku perwakilan nelayan Koperasi Komite Tuna Bisa Mandioli, saat Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Maluku Utara pada Desember 2022.



# PERKUAT SINERGI & KOLABORASI PERTEMUAN REGIONAL IV KPBP TUNA

Demi terus mendukung pengelolaan perikanan tuna yang lebih efektif di tingkat provinsi, MDPI bersama DKP Provinsi menginisiasi pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) tuna di enam provinsi yang menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan perikanan, termasuk nelayan skala kecil, pemasok, akademisi dan LSM, untuk berkomunikasi dan ikut terlibat dalam upaya pengelolaan perikanan.

Selain untuk mempertemukan pemangku kepentingan sektor perikanan, KPBP juga menjadi platform yang efektif bagi KKP dalam upaya diseminasi informasi dan kebijakan. Pertemuan regional diadakan untuk mempertemukan perwakilan anggota dari delapan KPBP Provinsi: Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, juga Sulawesi Tenggara dan Papua Barat yang difasilitasi oleh Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) dan Yayasan International Pole and Line Foundation (IPNLF) Indonesia.

Tahun ini, pertemuan regional keempat diadakan di Bali pada tanggal 28 Juli dan dihadiri oleh 150 peserta. Muhammad Zaini selaku Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP hadir sebagai pembicara utama untuk membahas seputar konsep kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sebagai upaya untuk mengimbangi manfaat ekonomi dan kemampuan sumber daya alam, dengan terus mengedepankan kemajuan nelayan skala kecil.

Pokok diskusi utama selama pertemuan sepanjang hari itu meliputi: peningkatan aksesibilitas dalam proses pendaftaran kapal dan pengurusan izin penangkapan ikan, pengaturan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan skala kecil, pengaturan



rumpon, percepatan implementasi *Harvest Strategy* di tingkat nasional, memperkuat sistem pelaporan hasil tangkapan ikan di pelabuhan dan penerapan Buku Kapal Perikanan elektronik.

Di tingkat provinsi, pertemuan reguler KPBP diadakan dua kali setahun untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan rutin menerima informasi tentang berbagai isu perikanan dan dapat mengikuti perkembangan segala kebijakan yang berpengaruh pada perikanan tuna di daerah tersebut. KPBP juga membahas isu-isu terkait tantangan pengelolaan perikanan tuna di tingkat provinsi, kemudian bersama mencoba merumuskan rencana kerja yang efektif untuk diimplementasi di tingkat provinsi, termasuk pengaturan rumpon, pengumpulan data hasil tangkapan, distribusi bahan bakar, legalitas nelayan dan pendaftaran kapal. Sebanyak 12 Pertemuan Reguler KPBP telah diadakan sepanjang tahun 2022 dengan jumlah total 738 peserta.



**Study Tour KPBP** - Melanjutkan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas para pimpinan KPBP, awal 2022 MDPI memfasilitasi kunjungan bagi beberapa pejabat KPBP Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Pulau Buru, Maluku untuk lebih memahami terkait sertifikasi produk perikanan seperti Marine Stewardship Council dan Fair Trade, sehingga dapat juga mengetahui gambaran umum aktivitas keseharian para nelayan kecil di Pulau Buru yang berbeda dari nelayan di Lombok. Saat kunjungan, mereka bertemu beberapa perwakilan dari salah satu kelompok nelayan di Desa Waprea dan Waepure yang turut berbagi pengalaman seputar proses sertifikasi.

“**Penangkapan ikan terukur memang bertujuan agar ekonomi dan ekologi seimbang. Harus berjalan berdampingan.**”

**Muhammad Zaini Hanafi**  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

#### APA LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK KPBP?

Sebelum Pertemuan Regional IV diadakan, perwakilan dari delapan DKP Provinsi bertemu untuk memperjelas peran dan tanggung jawab mereka dalam Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol. Sebanyak 20 peserta berpartisipasi dalam *Focus Group Discussion* ini, termasuk perwakilan DKP dari delapan provinsi anggota KPBP, juga beberapa perwakilan kunci dari MDPI dan AP2HI. Forum ini menjadi wadah pertukaran informasi dan pembelajaran seputar implementasi KPBP tuna di delapan provinsi, juga untuk menentukan masa depan KPBP serta sumber pendanaan demi mempertahankan keberlangsungan komite.



# PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN & KUALITAS PRODUK

Sebelum memasuki pasar, produk perikanan harus melewati tahapan penanganan dan pengolahan. Bagaimana nelayan skala kecil bisa menyalurkan ikan mereka dari laut ke pabrik pengolahan, hanya dengan menggunakan kapal kecil mereka?

**Keahlian nelayan pancing ulur dalam menangkap ikan memang tidak diragukan lagi**, namun setelah itu mereka harus menangani ikan dengan teliti untuk mencegah risiko penurunan kualitas yang juga dapat menyebabkan harga jual ikut menurun. Untuk memastikan bahwa nelayan memahami tahap penting ini, MDPI bermitra dengan Perlabuhan Perikanan Nusantara untuk memberikan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), untuk turut memastikan bahwa ikan yang dihasilkan di wilayah kerja MDPI memiliki kualitas tinggi dan dapat memenuhi persyaratan pasar, baik domestik maupun ekspor internasional.

Praktik penanganan ikan yang baik harus diterapkan dengan benar demi mencegah penurunan kualitas. Dengan menggunakan metode yang tepat, nelayan dapat mengurangi waktu penanganan ikan sehingga mereka dapat menjaga kualitas ikan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Sepanjang tahun 2022, MDPI memfasilitasi 3 pelatihan di Seram, Bone, dan Sula, melibatkan 130 peserta yang terdiri atas nelayan, pemasok lokal, perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya, yang kini semuanya makin memahami informasi teknis tentang teknik pendaratan ikan, penanganan darah, pembersihan dan penyimpanan ikan di kotak pendingin yang dibawa di kapal.

# PERLUASAN WILAYAH KERJA: GORONTALO & BALI

Di tahun 2022 MDPI mulai memperluas wilayah kerja ke tiga daerah baru di Gorontalo, Bali, dan menambah satu desa baru di NTB. Pendampingan di beberapa desa pesisir terus mendukung upaya pengumpulan data dan pengelolaan perikanan yang efektif, serta diharapkan dapat turut membangun kapasitas masyarakat pesisir di daerah tersebut.



Sejak 2013, MDPI telah bekerja di beberapa daerah di Provinsi NTB untuk mendukung pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol, termasuk melalui pengumpulan data perikanan dan penguatan kelembagaan, juga peningkatan kapasitas masyarakat pesisir melalui program pengorganisasian masyarakat. Di tahun 2022 MDPI mulai bekerja di Desa Kore, Kabupaten Bima yang turut menjadi salah satu lokasi pengumpulan data perikanan tuna sirip kuning.

Kota Gorontalo juga dinilai sebagai salah satu wilayah penting yang menjadi lokasi pendaratan hasil tangkapan yang berasal dari WPP 715. Asesmen untuk Gorontalo dilakukan di dua desa yaitu Desa Bongo dan Tanjung Kramat serta dua pelabuhan perikanan. Sedangkan di Karangasem Provinsi Bali, asesmen meliputi empat desa yaitu Desa Sukadana, Laba Sari, Seraya Timur dan Antiga. Program dampingan di kedua wilayah baru ini akan mulai berjalan sepenuhnya di tahun 2023 dengan melibatkan mitra dan pemangku kepentingan lainnya di daerah.

Selain kegiatan pendataan tuna sirip kuning, di tahun 2022 MDPI turut mengumpulkan data tuna neritik, di antaranya termasuk tongkol dan makarel. Jumlah produksi tuna neritik masih banyak yang belum dilaporkan, karena ikan ini banyak ditangkap oleh nelayan kecil yang tersebar di pesisir pulau kecil. Kesenjangan data dan informasi seputar tuna neritik pun menjadi salah satu kendala dalam upaya pengelolaan perikanan tuna neritik di tingkat provinsi, nasional dan internasional. Melalui rangkaian lokakarya teknis, MDPI bekerja sama dengan peneliti untuk mengembangkan pedoman kerangka survei yang berfokus pada spesies ini.

Dengan hadirnya MDPI di beberapa desa kunci tersebut, diharapkan kegiatan pengumpulan data melalui metode *port sampling* dan *frame survey* dapat menjadi kontribusi bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan Pusat dalam mengupayakan pengelolaan perikanan Indonesia yang lebih efektif ke depannya.



# MDPI ON THE MAP

## JANGKAUAN & CAPAIAN

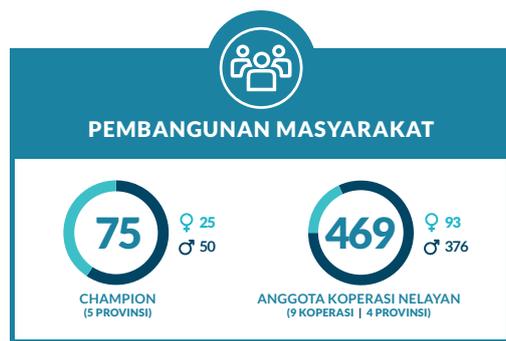
Dengan diluncurkannya strategi untuk implementasi program tahun 2020-2025, pengelolaan perikanan terus diupayakan termasuk melalui pengumpulan data, pemberdayaan masyarakat, dan beragam pelatihan peningkatan kapasitas untuk masyarakat pesisir di Indonesia timur.



Kegiatan di Gorontalo dimulai tahun 2022 dengan serangkaian asesmen di 2 desa dan 2 pelabuhan perikanan untuk melakukan pendampingan masyarakat, pengelolaan perikanan, dan persiapan pembentukan komite pengelola bersama (*co-management committee*) dengan *stakeholder* terkait.



Pada pertengahan 2021 kantor lapangan MDPI berpindah dari Kota Manado ke Kabupaten Minahasa Utara, mencakup 1 desa. Seluruh kegiatan turut mendukung upaya pengelolaan bersama dan pembangunan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kapasitas dan pengumpulan data perikanan di 2 *landing site*, termasuk di Kota Manado, dan secara langsung mendampingi 50+ nelayan.



Melalui pengelolaan bersama data perikanan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan adanya dukungan dari pemerintah, MDPI turut terlibat dalam perbaikan perikanan skala kecil di Kabupaten Bone. Sejak 2012, masyarakat aktif diberikan informasi seputar perikanan skala kecil yang kemudian diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan pemerintah.



MDPI memperluas wilayah kerja ke Karangasem, Bali dengan melakukan pengembangan kerangka survei untuk mendukung kegiatan pendataan perikanan neritik tuna di 2 desa.

Wilayah kerja pertama MDPI yang telah masuk dalam cakupan pengumpulan data dan menjadi tempat bertemunya nelayan dan pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengetahuan. Selama tahun 2022, MDPI turut mendukung pengembangan ekonomi untuk 150+ nelayan dan mengumpulkan data perikanan di 4 lokasi pendaratan.





**KEPULAUAN SULA**  
EST. 2018

Hasil tuna yang melimpah membuat Kepulauan Sula menjadi lokasi potensial untuk program perikanan berkelanjutan, beberapa di antaranya mencakup implementasi FT USA dan *data collection*. Program kerja MDPI di Sanana telah berjalan sejak 2018 di 2 desa bersama 100+ nelayan dampingin dan 6 kelompok.



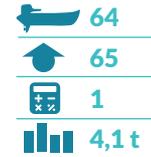
**MOROTAI**  
EST. 2018

Sumber daya perikanan Morotai berperan penting bagi rantai pasok. Berbagai program dijalankan demi mendukung rencana pengelolaan tuna, termasuk pekerjaan MDPI yang mencakup pendampingan dan *data collection* di 1 desa, 1 *landing site* bersama 25 nelayan.



**TERNATE**  
EST. 2018

Kantor MDPI Ternate didirikan untuk memperluas jangkauan implementasi FT USA dan pengumpulan data perikanan di Maluku Utara. Pada tahun 2022 pekerjaan MDPI mencakup 4 desa dan 4 kelompok nelayan.



**HALMAHERA SELATAN**  
EST. 2017

Di tahun 2022, pekerjaan MDPI di Halmahera Selatan mencakup 4 desa dan 4 *landing site*, mendampingi 60+ nelayan dari 5 kelompok di Pulau Bisa dan Pulau Bacan. Selain menerapkan standar FT USA, program lain seperti *data collection* juga dijalankan demi mendukung upaya pengelolaan perikanan.

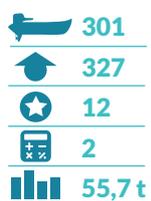


Pertama kali menerapkan standar FT USA di tahun 2015, di tahun 2022 MDPI bekerja dengan 7 kelompok nelayan di 6 desa dan secara langsung mendampingi 140+ nelayan. Kegiatan pengumpulan data perikanan juga terus dijalankan demi mendukung pengelolaan perikanan di Maluku.



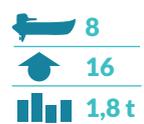
**SERAM**  
EST. 2015

Pekerjaan MDPI di Buru telah berjalan lebih dari 9 tahun dan menjadi wilayah kerja pertama yang berhasil mendapatkan 2 *eco-label*: sertifikasi FT USA dan MSC. Mencakup 10 desa dan 15 kelompok nelayan, di tahun 2022 MDPI mendampingi 300+ nelayan, 10 pemasok dan 2 unit pengolah ikan, serta memfasilitasi pengembangan 2 koperasi nelayan.



**BURU**  
EST. 2013

Pendataan perikanan dan akselerasi kelengkapan legalitas nelayan menjadi kegiatan utama yang dilakukan MDPI di salah satu desa di Kore demi mendukung pengelolaan perikanan yang efektif dan berkelanjutan.



**BIMA**  
EST. 2022

Potensi perikanan tuna NTT penting untuk dikelola secara efektif. Sejak awal berdiri, MDPI tinggal bersama nelayan, menjadi bagian dari komunitas mereka dan terus menerapkan rangkaian *best practice* di tengah masyarakat, termasuk dalam pengumpulan data di 3 lokasi pendaratan, juga peningkatan kapasitas untuk dapat terlibat aktif dalam upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan.



**KUPANG**  
EST. 2013



# LITERASI FINANSIAL: KELUARGA NELAYAN DAN EKONOMI PESISIR

Pemberdayaan masyarakat telah lama melekat dalam misi MDPI untuk menciptakan masa depan perikanan Indonesia yang lebih berkelanjutan. Kesenjangan literasi keuangan yang dialami masyarakat pesisir memotivasi MDPI untuk meningkatkan pemahaman manajemen keuangan di tingkat rumah tangga nelayan, mengingat pentingnya peranan mereka dalam mempertahankan keberlanjutan ekonomi pesisir.

**Nelayan dan istri nelayan memainkan peran penting** dalam mengelola keuangan rumah tangga, namun tidak jarang dari mereka mengabaikan pencatatan sederhana untuk merekam aktivitas pemasukan dan pengeluaran sehari-hari, menentukan prioritas kebutuhan, hingga menjalankan pos-pos keuangan rumah tangga.

Melalui pelatihan literasi keuangan, fokus MDPI yaitu meningkatkan pemahaman rumah tangga nelayan untuk mengelola keuangan sehingga mampu bertahan dan melewati kejadian tak terduga seperti bencana alam, wabah, tidak musim ikan, sakit, dan kecelakaan di laut. Lebih dari itu, fokus lain kami adalah menciptakan hubungan antara literasi keuangan dengan topik perikanan berkelanjutan.

Sejak Desember 2021, MDPI mengembangkan permainan Simulasi Kelola Oeang Nelayan, disingkat “Si Keong Nelayan”, sebagai media pembelajaran menarik tentang pengelolaan keuangan. Menanamkan aspek kehidupan pesisir dan kebiasaan keseharian masyarakat ke dalam permainan ini menjadi elemen penting untuk memperkuat penyampaian informasi dalam pelatihan.

Sebelum finalisasi, permainan ini telah diuji coba di komunitas dampingan MDPI untuk mendapatkan masukan terkait teknis, ritme, dan tambahan lainnya guna menyempurnakan permainan. Setelah melewati proses finalisasi, tim MDPI sebagai pendamping menjalankan tahap selanjutnya dengan memberi pelatihan secara langsung pada masyarakat dampingan.

Sebelum memulai permainan, MDPI memberikan penjelasan dasar tentang inklusi gender. Permainan ini mengajak para pemain, yang terdiri dari tim suami dan istri dari rumah tangga nelayan, untuk berbagi peran dalam mengelola keuangan mereka, juga menjadi kesempatan untuk membahas pentingnya keberagaman gender dalam sektor perikanan dan pengembangan ekonomi pesisir secara lebih luas.

“**Saya dan suami menjalankan pos keuangan sejak mendapatkan pelatihan. Kami sudah bisa menyisihkan penghasilan untuk ditabung.**”

**Dina Rukmana**

Pengurus Koperasi Segare Harapan Jaya, Lombok Timur

Di tahun 2022, sebanyak 774 peserta perempuan dan laki-laki yang mewakili lebih dari 450 rumah tangga nelayan di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat telah terlibat dan mendapatkan edukasi literasi keuangan melalui metode interaktif ini. Beragam informasi dan pengalaman yang didapatkan saat pelatihan memberikan goresan manfaat yang tak terlupakan bagi peserta. Tidak sedikit dari mereka mengakui bahwa setelah pelatihan, pengelolaan keuangan keluarga mereka menjadi lebih teratur. Beberapa nelayan kini bisa membeli bensin sendiri tanpa harus bergantung lagi pada pemodal lain. Para nelayan juga merasakan bahwa konsep perikanan berkelanjutan yang disisipkan saat pelatihan mendorong mereka untuk terus melaksanakan praktik perikanan yang bertanggung jawab, karena mereka pun percaya bahwa kesehatan ekosistem juga akan berdampak bagi keberlanjutan ekonomi keluarga mereka.



## LITERASI FINANSIAL FASE 2: SI KOMPAS NELAYAN

Program pengembangan kapasitas literasi keuangan dari MDPI saat ini telah memasuki fase kedua, dengan pengembangan permainan simulasi baru yang disebut “Si Kompas Nelayan”, singkatan dari Simulasi Kelola Mimpi dan Asa Nelayan. Permainan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam mencapai target keuangan dan mimpi keluarga, dengan membantu mereka dalam menentukan prioritas tujuan keuangan mereka dan mengidentifikasi instrumen untuk mencapainya, termasuk melalui pengembangan usaha dan investasi. Saat ini Si Kompas Nelayan tengah menjalani tahap uji coba untuk mengumpulkan umpan balik penting dari masyarakat dampingan dan akan difinalisasi di tahun 2023.

# PERAN PEREMPUAN MENGELOLA USAHA UNTUK TINGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA NELAYAN

Salah satu kegiatan yang dijalankan oleh program Fisheries Community Organization MDPI adalah pembentukan Koperasi Nelayan sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pesisir. Dari total 524 anggota koperasi, 96 perempuan aktif terlibat dalam pengembangan koperasi, bahkan 12 perempuan di antaranya aktif menjabat sebagai pengurus dan pengelola unit usaha koperasi.



Dengan mendorong keterlibatan perempuan, koperasi dikelola oleh anggota masyarakat dan turut mempermudah keluarga nelayan dalam mengakses kebutuhan logistik melaut, memudahkan keluarga nelayan dalam mendapatkan modal usaha, juga memudahkan nelayan dalam penjualan hasil melaut dengan harga yang adil. Keuntungan dari usaha koperasi juga dibagikan kepada seluruh anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) sehingga turut memberi pendapatan tambahan rumah tangga.



MDPI telah mendukung pembentukan koperasi dalam beberapa tahun terakhir yang kini mampu memberikan modal usaha kepada anggotanya. Contohnya, Koperasi Kembali Muda Mandiri di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan telah mampu memberikan modal usaha kepada sekelompok istri nelayan untuk memproduksi ikan asap dan ikan asin khas Bone, atau ikan dempo. Mama Tuna Mandiri adalah sebuah Kelompok Perikanan Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) yang digerakkan oleh perempuan, untuk mengolah produk perikanan demi mengupayakan kemandirian ekonomi di tingkat rumah tangga nelayan. Ke depannya, kelompok ini akan mengupayakan legalitas melalui pembentukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kelompok untuk terus mengembangkan usaha kelompok dan variasi pengolahan ikan sebagai diversifikasi mata pencaharian.



## KEBERHASILAN KOPERASI BUBULA MA CAHAYA

Tidak sedikit kelompok nelayan yang mulai menunjukkan kemandirian mereka dalam berorganisasi, salah satunya Kelompok Nelayan Marimoi. Kelompok Nelayan Marimoi sudah menjalankan skema sertifikasi Fair Trade selama lebih 4 tahun dan saat ini telah beralih melalui skema yang lebih mandiri melalui Koperasi Babula Ma Cahaya. Dana premium yang dimiliki kelompok menjadi sokongan modal pengembangan unit bisnis koperasi. Kegiatan sertifikasi telah membentuk kelompok nelayan menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam memilih rantai bisnis yang dapat mensejahterakan perekonomian keluarga nelayan. MDPI juga semakin yakin bahwa pendampingan kami kepada masyarakat pesisir di Kelurahan Jambula akan terus meninggalkan manfaat untuk pengembangan kapasitas mereka dalam pengelolaan organisasi, keuangan, dan bisnis.

Di Lombok Timur, NTB, perempuan di Desa Seruni Mumbul mengemban peran penting dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan jual beli hasil tangkapan nelayan di bawah koperasi nelayan. Keberadaan Koperasi Segare Harapan Jaya turut membuka wawasan mereka dan menumbuhkan keinginan untuk terlibat dalam pengelolaan perikanan di NTB, serta memberikan ruang untuk perempuan bergerak maju dalam mengembangkan potensi wilayah melalui peningkatan diversifikasi mata pencaharian. Nelayan setempat kini dapat menjual hasil tangkapan harian mereka, termasuk ikan dan gurita, dengan harga yang layak. Selain itu, mereka juga dapat menambah pendapatan harian dengan menjual sampah plastik yang dapat didaur ulang kepada koperasi, yang sebagian besar terjaring saat melaut.

### Beberapa usaha lain yang dijalankan di bawah koperasi nelayan binaan MDPI (per 2022):

- **Koperasi Bupolo Bersatu, Waprea, Pulau Buru**  
Jual beli sembako
- **Koperasi Latamiha Indah Bersatu, Waelihang, Pulau Buru**  
Jual beli logistik melaut dan jual beli hasil laut
- **Koperasi Tuna Bersaudara Mandiri, Amahai, Pulau Seram**  
Simpan pinjam/perkreditan
- **Koperasi Bubula Ma Cahaya, Jambula, Ternate**  
Jual beli bahan bakar minyak, oli, dan hasil laut
- **Koperasi Tuna Mandiri, Salumpaga, Tolitoli**  
Jual beli logistik melaut
- **Koperasi Tuna Bisa Mandioli, Madapolo Timur, Pulau Bisa**  
Jual beli hasil laut



**Koperasi jadi wadah untuk mengembangkan kapasitas perempuan dalam berorganisasi, pembukuan, dan pengembangan bisnis.**

**Hernawati**

Bendahara Koperasi Kembali Muda Mandiri, Bone



# PENGELOLAAN SAMPAH WUJUDKAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

Sejak 2020, MDPI menjadikan pengorganisasian masyarakat sebagai pendekatan dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan. Salah satu prioritas yang diidentifikasi oleh masyarakat dampingan MDPI adalah memerangi polusi laut, melalui solusi di tingkat lokal seperti berkolaborasi dengan bank sampah setempat dan menetapkan Peraturan Desa.

**Di Seram, Maluku**, sekelompok pemuda di Desa Tehoru menjadi motor penyusunan Peraturan Desa terkait pengelolaan sampah setempat. Proses panjang yang dimulai sejak Oktober 2021 bersama para pemuda dan perangkat desa yang turut mencakup serangkaian kegiatan studi banding, demi memaksimalkan upaya pengelolaan dan penerapan peraturan di Negeri (desa) Tehoru. Proses penyusunan Peraturan Desa dimulai dari asesmen di masyarakat, *Focus Group Discussion*, konsultasi publik, hingga akhirnya Peraturan Desa resmi disahkan pada April 2022.

Selain penyusunan Peraturan Negeri, MDPI bersama Pemerintah Desa turut memfasilitasi Capacity Building Relawan Lingkungan dan Sekolah Relawan. Didorong oleh semangat anak muda dan perangkat desa di Tehoru, komunitas relawan Tehoru Kalesang Sampah (TRASH) Indonesia akhirnya terbentuk, dengan mayoritas

anggota yang terdiri dari kelompok pelajar dan pemuda. Para relawan diyakini memiliki kekuatan menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan edukasi ke masyarakat, khususnya dalam mengajak masyarakat turut berperan aktif mengumpulkan dan memilah sampah plastik di tingkat rumah tangga.

Dalam gerakan ini para nelayan juga turut dilibatkan, mengingat mayoritas penduduk di Desa Tehoru merupakan keluarga nelayan. Antusiasme para pemuda turut memotivasi pemerintah daerah untuk menanggapi aksi ini dengan serius. Pada Oktober 2022, komunitas TRASH Indonesia dan para relawan dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku dan akan bekerja bersama Pemerintah Negeri Tehoru dalam penanggulangan sampah. Dengan bantuan fasilitas seperti transportasi pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku dan akses masuk



**Pengelolaan sampah menuju Desa Wisata** - Di awal Oktober 2022, MDPI memfasilitasi perwakilan Desa Minaesa, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara mengunjungi beberapa daerah kunci di sekitar Desa Perancak dan Denpasar, Bali. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas para *stakeholder* desa, guna mendukung pengembangan Minaesa sebagai Desa Wisata. Selama 5 hari, peserta belajar dari masyarakat lokal, mengikuti kegiatan observasi dan lokakarya terkait pariwisata. Kegiatan penguatan kapasitas bertujuan untuk memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi para pemangku kepentingan desa dalam mencari solusi yang dapat diaplikasikan secara kontekstual, demi membantu peningkatan ekonomi daerah dengan tetap menjaga kelestarian alam dan mewujudkan perikanan yang berkelanjutan. Menuju akhir 2022, Desa Minaesa memulai proses penyusunan Peraturan Desa terkait pengelolaan sampah sebagai fondasi dalam mengembangkan Minaesa sebagai desa wisata.

ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dibangun menggunakan dana desa, upaya pengelolaan sampah di Tehoru saat ini mencakup pemilahan sampah bernilai dan nantinya dapat turut menjadi pemasukan dana desa.

Pada November 2022, MDPI bersama TRASH Indonesia dan Pemerintah Desa menjalankan kegiatan Gerakan Aksi Tuntas Sampah Tehoru, termasuk bakti sosial dan

edukasi seputar pemilihan dan pemilahan sampah. Bertepatan dengan peringatan Hari Perikanan Sedunia, para relawan TRASH juga mengadakan bersih pantai bersama seluruh masyarakat termasuk nelayan, pelajar, pemerintah desa, tentara, dan Puskesmas setempat. Selain memisahkan sampah yang bernilai ekonomis, pemilahan juga dilakukan untuk mempermudah proses Brand Audit untuk mendata ragam produk dan produsen yang banyak mencemari lingkungan.



# PENINGKATAN KAPASITAS PENGGERAK PERUBAHAN LOKAL

Dalam menerapkan pendekatan perubahan perilaku di desa dampingan, MDPI mengidentifikasi individu yang memiliki kepedulian, semangat dan potensi untuk menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat pesisir.

Sejak 2020 MDPI telah membina 75 champion, termasuk 25 perempuan yang tersebar di seluruh wilayah kerja. Selain coaching dan dampingan di lapangan secara rutin, para penggerak perubahan juga dibekali dengan berbagai rangkaian kegiatan penguatan kapasitas. Dilaksanakan pada bulan Mei 2022 di Denpasar dan Nusa Penida, Bali, beberapa *local champion* dari Lombok (4 orang), Bone (4 orang), Minahasa Utara (3 orang), menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk menyediakan ruang diskusi bagi para peserta dampingan dan tim MDPI terkait koordinasi maupun pelaksanaan program champion ke depan, menyatukan persepsi mengenai tugas, peran dan fungsi 'champion' dalam mewujudkan perikanan yang lebih berkelanjutan.

Melalui rangkaian studi banding, para peserta juga melihat dan belajar seputar pengelolaan sebuah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), mempelajari diversifikasi produk perikanan, hingga pengelolaan organisasi dan manajemen usaha koperasi dari salah satu koperasi di Denpasar. Di samping itu, para peserta juga mempelajari proses pembuatan rumput laut bubuk, berbagi pengalaman tentang teknik melaut dengan nelayan di Desa Suana, melihat program pelestarian penyu, juga program mengenai pancing sampah di laut. Rangkaian studi banding ini diharapkan dapat memperluas wawasan para champion agar mereka mampu menjawab berbagai isu yang ada di komunitas mereka masing-masing, sehingga dapat menerapkan solusi dan membawa perubahan positif menuju perikanan yang lebih berkelanjutan.

# MANFAAT SERTIFIKASI BAGI NELAYAN & PRODUK PERIKANAN

Kelompok Nelayan Fair Trade yang telah menjadi dampingan MDPI sejak 2014 semakin aktif mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Melalui skema sertifikasi, para nelayan menanamkan kebiasaan dan mengamalkan aksi lestari dalam kegiatan perikanan harian mereka.

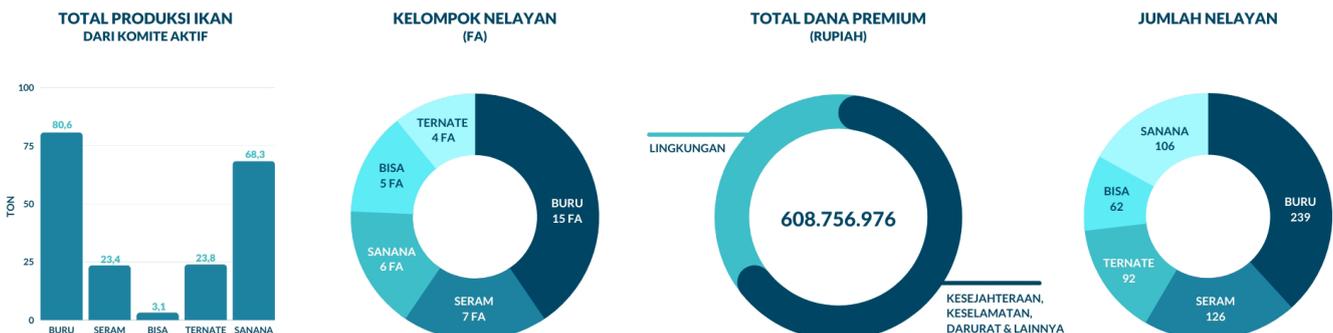
MDPI menggunakan pendekatan yang sangat tepat, dengan secara rutin mengunjungi komunitas nelayan yang terlibat, bahkan beberapa tim kami bekerja dan tinggal di desa-desa dengan masyarakat pesisir untuk memungkinkan pemantauan jarak dekat dan dampingan langsung bagi setiap kelompok nelayan. Melalui skema sertifikasi, manfaat berupa pengembangan kapasitas diri membantu membangun nelayan menjadi lebih mandiri dalam mengelola organisasi, termasuk mengatur pertemuan kelompok dan komite. Para nelayan menjadi semakin percaya diri untuk berdiri di depan saat rapat umum dan menjelaskan gagasan mereka terkait praktik perikanan lestari. Selain mengedepankan penangkapan yang lebih bertanggung jawab, manfaat sertifikasi Fair Trade tidak hanya dirasakan oleh nelayan, namun pemasok kecil dan pemasok utama turut menghasilkan produk yang lebih dipercaya dan mampu bersaing secara global.

Manfaat dan kemajuan yang dirasakan penerima manfaat kami turut mendorong MDPI untuk menjangkau kelompok nelayan lainnya dalam peningkatan kesadaran dan konsep sertifikasi untuk produk perikanan. Momentum ini berhasil digunakan untuk mendirikan 5 kelompok nelayan yang tersebar di Buru, Seram, Sula, dan Ternate. Dukungan dan peran aktif pembentuk kelompok nelayan baru turut menghasilkan penambahan sertifikat tahun nol dan menjadikan organisasi kami untuk pertama kalinya dapat berkolaborasi dengan komunitas nelayan, pemasok, dan perusahaan pengolah dalam menjalankan tiga sertifikasi dalam tahapan keikutsertaan tahun yang berbeda.

Aktor perikanan baru tidak hanya datang dari kelompok nelayan, satu perusahaan pengolah yaitu Mitra Tuna Mandiri berhasil melaksanakan serangkaian mekanisme sertifikasi termasuk audit tahunan untuk memastikan seluruh standar sertifikasi telah benar terpenuhi. Berdasarkan penilaian auditor, melalui penilaian resiko yang dilaksanakan sebelum audit bertujuan untuk mengidentifikasi resiko ketidakpatuhan, ketiga perusahaan pengolah dampingan yaitu Harta Samudra Buru, Harta Samudra Ambon, dan Mitra Tuna Mandiri Ternate berhasil melewati penilaian penuh audit dan menunjukkan nihil ketidakpatuhan. Selain kemajuan perusahaan pengolah, sebagian besar pihak terlingkup Fair Trade di lokasi dampingan MDPI cukup memahami dan mengimplementasi standar Fair Trade.

## IMPLEMENTASI FAIR TRADE

DALAM ANGKA



# MASYARAKAT PESISIR WUJUDKAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

Setiap tahun, MDPI turut ambil bagian dalam memperingati Hari Perikanan Sedunia dan Hari Ikan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 21 November, dengan menggandeng para nelayan dan anggota masyarakat pesisir lainnya, serta pemerintah daerah dalam kegiatan Sharing Information & Data (SID).



Sebagai salah satu kegiatan rutin dalam momentum ini, SID bertujuan untuk menyampaikan kembali hasil pengumpulan data perikanan tuna pancing ulur yang dikerjakan oleh MDPI dan membagikan informasi relevan lainnya. Dengan mendorong partisipasi aktif nelayan dan istri nelayan, termasuk para champion, kegiatan SID diadakan di seluruh wilayah kerja MDPI.

Rangkaian kegiatan SID dan WFD diikuti lebih dari 1.000, termasuk 402 perempuan, dan dalam sehari tercatat sebanyak total lebih dari 100 kg sampah yang terkumpul di beberapa desa dampingan MDPI khususnya di wilayah Maluku, Lombok Timur dan Minahasa Utara. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk terus mengingatkan masyarakat tentang beberapa aspek penting dalam mendukung perikanan yang berkelanjutan, di antaranya adalah pentingnya pengumpulan data bagi pengelolaan perikanan yang efektif, dampak sampah terhadap

perikanan, isu dan tantangan yang dihadapi oleh nelayan, hingga sosialisasi *e-logbook* kepada nelayan. Selain itu, MDPI juga membagikan rapor hasil tangkapan nelayan selama satu tahun terakhir. Besar harapan rangkaian kegiatan rutin ini dapat menjadi bahan refleksi dan terus memberikan dorongan bagi semua *stakeholder* dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Selain meningkatkan kesadaran dan peran nelayan skala kecil dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, MDPI juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat pesisir untuk ikut menjaga laut dari polusi sampah plastik. Kampanye edukasi tentang sampah rutin dijalankan, termasuk kegiatan bersih sampah di pesisir pantai (*beach clean up*), juga penanaman bakau sebanyak 1.500 bibit seperti yang dilakukan di wilayah kerja MDPI dalam rangka memperingati Hari Perikanan Sedunia dan Hari Ikan Nasional tahun ini.



#### Mendukung perikanan berkelanjutan -

Berbagai cara dapat dilakukan masyarakat untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan, termasuk melalui pengumpulan data perikanan dan pengelolaan sampah di desa pesisir.

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan perikanan yang berkelanjutan, MDPI turut mendukung upaya pengelolaan sampah, termasuk penyuluhan mendalam mengenai pemilahan sampah di beberapa desa dampingan, khususnya di Pulau Seram, Lombok Timur dan Minahasa Utara. Setelah bersih sampah, MDPI juga memberikan edukasi terkait proses pemilahan sampah dan keuntungannya dari segi ekologi serta ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat turut berperan aktif dalam mengumpulkan dan memilah sampah plastik untuk kemudian dikelola oleh desa atau koperasi setempat.

Kesadaran ekologi dari masyarakat pesisir juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi setempat. Sampah yang terus dibiarkan di laut akan turut berdampak pada ekologi laut, sehingga kerap mengganggu aktivitas rutin nelayan dalam penangkapan ikan maupun mata pencaharian masyarakat pesisir pada umumnya.

Sampah berserakan yang tidak dikelola tentunya akan berdampak pada kesehatan dan ketenteraman hidup masyarakat sekitar. Selain bersih pantai, MDPI juga mendampingi sebagian proses *Brand Audit* di Desa Tehoru, Pulau Seram dan mengumpulkan data seputar ragam produk dan produsen yang banyak mencemari lingkungan. Dalam sehari tercatat sebanyak total 17 kg sampah yang terdiri dari 1.655 kemasan plastik, dengan penyumbang sampah terbanyak yaitu Ayudes, Ale-Ale dan Kiko.

Melalui rangkaian bersih sampah dan *Brand Audit* seperti ini, komunitas maupun setiap individu diharapkan dapat menghadirkan solusi jangka panjang dan gerakan nyata demi bersama-sama menyelesaikan masalah sampah di daerah mereka.

# PENGGERAK EKOSISTEM PERIKANAN

Selain memperbaiki tata kelola perikanan, MDPI juga memastikan bahwa masyarakat pesisir dapat terus berkembang. Selain membangun kemitraan, kami turut membangun kepemimpinan di tengah masyarakat.



**KASMAN  
KARIM**

Nelayan tuna asal Sulawesi Utara ini telah menekuni profesinya sejak 32 tahun silam. Para nelayan tuna di Desa Minaesa, Kabupaten Minahasa Utara seperti Kasman biasanya melaut ke luar daerah selama berbulan-bulan, membuat mereka dikenal sebagai nelayan handal dari tanah Nyiur Melambai. Di tahun 2021, Kasman Karim dan 18 orang nelayan lainnya membentuk Kelompok Nelayan yang dinamai Kelompok Nelayan Talawaan Bajo Mandiri. Semenjak tergabung dalam kelompok nelayan, Kasman kini aktif hadir mewakili komunitasnya dalam menyampaikan aspirasi para nelayan kecil di berbagai forum diskusi multi-stakeholder perikanan tingkat daerah maupun tingkat nasional. Menurut beliau, nelayan harus mampu tampil dan ambil bagian dalam ruang diskusi agar memperluas wawasan informasi. Beliau percaya bahwa ikan tuna, yang telah lama

menjadi sumber matapencahariannya, suatu waktu akan habis keberadaannya jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesehariannya Kasman juga aktif menjadi penggerak perubahan di Minaesa, termasuk menjangkau nelayan-nelayan lain di luar anggota kelompok untuk mendorong praktik perikanan yang bertanggung jawab dan menjalankan berbagai kegiatan lainnya yang menjadi aspek penting dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan.

Sebagai Analis Pengelolaan Sumber daya Ikan pada Bidang Perikanan Tangkap, Ibu Anita menjadi salah satu pengurus Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak tahun 2017, beliau cukup aktif berkontribusi terkait operasionalisasi KPBP Tuna. Baik pertemuan reguler, pertemuan regional, koordinasi dengan *stakeholder*, hingga pelaksanaan rencana aksi KPBP Tuna. Menjabat sebagai Sekertaris KPBP Tuna Provinsi NTT, semangat juang, kesabaran dan kegigihannya membuat banyak kerja-kerja bersama dalam peningkatan pengelolaan perikanan tuna di provinsi NTT dapat tercapai. Contohnya, sosialisasi perizinan bidang perikanan tangkap, kontribusi pada pertemuan *Harvest Strategy* Tuna, penguatan data statistik perikanan tangkap, akselerasi proses perizinan, dan berbagai hal lainnya dapat dikawal dengan baik. Beliau sangat yakin dan percaya, bahwa niatan yang baik dan keinginan bekerja bersama orang-orang yang baik, akan menghasilkan hal yang baik pula.



**ANITA  
MOZES**



ARIYANTI

Di pesisir Ternate, Maluku Utara, beberapa perempuan yang menjadi bagian dari koperasi nelayan di Desa Jambula kini disibukkan dengan beragam aktivitas unit usaha koperasi. Sejak tahun 2021, Ariyanti menjadi salah satu perempuan pesisir yang terlibat dalam mengelola keuangan dan bisnis koperasi nelayan. Dipercaya sebagai bendahara Koperasi Bubula Ma Cahaya di tahun 2022, Ariyanti kerap mengisi sorenya dengan telaten mencatat, menimbang, hingga melakukan transaksi untuk unit usaha jual beli ikan maupun penjualan bahan bakar minyak dan oli. Beberapa unit usaha yang digagas bersama kini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir sekitar. “Koperasi membawa banyak kemudahan. Akses bahan bakar minyak lebih mudah dan nelayan tidak lagi khawatir terjadi penurunan kualitas ikan karena langsung diurus koperasi,” ungkapnya. Menjadi bagian dari rumah tangga nelayan pun membuat Ariyanti tergerak untuk aktif terlibat dalam berbagai

upaya peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan, termasuk dalam mengeksplorasi diversifikasi mata pencaharian. Ariyanti juga aktif menyuarakan aspirasi di forum pengelolaan perikanan dan beberapa kali menjadi perwakilan masyarakat pesisir Jambula di pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan, baik di tingkat daerah maupun nasional, memberikannya kesempatan berdiskusi bersama perwakilan pemangku kepentingan perikanan lainnya dari unsur pemerintah, akademisi, dan industri.

Pria kelahiran Ambon ini adalah salah satu nelayan pancing ulur tuna dari Dusun Haruo, Desa Rutah, Maluku. Perahu kecil dan mesin tempel yang dimilikinya menjadi senjata utama La Yamin dalam menaklukkan ikan tuna. Sebagai salah satu nelayan tuna senior, semangat La Yamin dalam membangun mimpi perikanan tuna yang lebih berkelanjutan tidak dapat dipandang sebelah mata. Di tahun 2015, ia menjadi salah satu tokoh nelayan yang menggagas pembentukan kelompok nelayan di komunitasnya. Tergabung dalam kelompok nelayan Fair Trade Darah Tuna Haruo binaan MDPI di tahun 2015, La Yamin dipercaya menjadi ketua saat kelompok pertama terbentuk dan kini ia telah meregenerasi kelompoknya agar kalangan muda dapat meneruskan perjuangannya. Di tengah kesibukannya sebagai nelayan tuna, La Yamin adalah pribadi yang sangat aktif dalam mendorong rekan-rekannya untuk berdiskusi seputar aksi nyata dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan. Hampir di setiap rapat kelompok, beliau lah yang berperan untuk menemui para nelayan lain dari pintu ke pintu, mengunjungi setiap rumah demi memastikan rapat kelompok dapat berjalan dengan dihadiri seluruh anggotanya. Selain itu, beliau selalu bersedia menjadikan rumahnya menjadi tempat pertemuan para nelayan. Salah satu wujud nyata yang dilakukan La Yamin dalam mendukung upaya pengelolaan perikanan adalah dengan rutin menyediakan *logbook* catatan hasil tangkapan ikan. Bahkan, kini La Yamin dalam selalu membawa ponselnya saat melaut untuk mencatat kegiatan penangkapannya dalam *e-logbook*. “Saya merasa senang dalam melakukan pengisian *e-logbook* langsung di atas kapal saat melakukan penangkapan dan berkesempatan menyumbang data perikanan untuk pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang lebih efektif ke depannya.”



LA YAMIN

# MEET THE TEAM

MDPI bangga memiliki tim dengan keahlian yang beragam dan semangat yang selaras demi membangun ekosistem perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Tim kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pekerjaan kami dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir di berbagai belahan negeri.



Awal perjalanan karir I Wayan Widiantara bersama MDPI bermula pada tahun 2014, saat ia bergabung sebagai Office Assistant. Akrab disapa sebagai “Bli Widi” oleh rekan-rekannya, Wayan adalah salah satu warga asli Bali yang meniti karir di MDPI dari level awal. Bli Widi dikenal sebagai individu yang rajin dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan sosialnya, ia juga dikenal sebagai pria yang cekatan dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Sifatnya yang akuntabel membawanya ke posisi yang lebih tinggi, sebagai General Affairs Officer. Sejak diangkat menjadi officer, Bli Widi bertugas untuk memastikan kebutuhan barang dan jasa MDPI berjalan dengan lancar, inventarisasi aset kantor, bekerja dalam tim untuk menjamin keamanan dan kebersihan kantor, serta membantu proses keuangan dan administrasi kepegawaian. Meski tidak terlibat langsung di lapangan, tugas Bli Widi telah membantu kesuksesan berbagai aktivitas program di balik layar.

Siti Zulaeha memulai karirnya di MDPI sejak tahun 2018 sebagai Fair Trade Assistance, teman-teman MDPI sering memanggilnya Leha. Pribadi dengan karakter yang kuat, kemampuan beradaptasi dengan cepat dan komunikatif membuatnya mudah diterima di komunitas masyarakat pesisir dan rekan-rekan sekerjanya. Mulai tahun 2023, MDPI mempercayakan Leha menjadi Livelihood Officer untuk mendorong berbagai upaya pengembangan diversifikasi mata pencaharian bagi masyarakat pesisir di wilayah dampungan MDPI. Leha memiliki banyak pengalaman dalam implementasi Program Sertifikasi Fair Trade Amerika dan Pengembangan usaha koperasi nelayan skala kecil. Lima tahun sudah wanita muda asal Palembang ini berkarir dan mengabdikan di Indonesia Timur untuk berbagai program kelautan dan perikanan di Indonesia.





Bergabung di MDPI sejak Januari 2016, Alief memulai karirnya sebagai Site Supervisor Kupang sejak 2016 hingga 2019 akhir di mana bertanggung jawab untuk menyediakan data tuna dan membantu dalam memfasilitasi kegiatan *co-management*. Di tahun 2020, Alief dipercaya untuk bertanggung jawab atas program Fair Trade untuk membantu menyediakan data premium, menyediakan bahan audit hingga membuat laporan untuk *stakeholder* yang berkaitan dengan Fair Trade. Saat ini, Alief kembali dipercaya sebagai Cooperative Officer untuk bertanggung jawab atas program koperasi dengan membantu kelengkapan administrasi koperasi hingga memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengurus. Hal menarik yang didapatkan selama bekerja di mana MDPI memberikan banyak sekali kesempatan belajar terkait perikanan maupun komunitas. Alief percaya bahwa cara hebat untuk melakukan pekerjaan yang hebat yaitu dengan mencintai apa yang sedang dilakukan.



Kini menjadi anggota tim Fisheries Program, Santri pertama bergabung bersama MDPI di tahun 2017 sebagai bagian dari tim Operations. Santri kini menjadi staff MDPI yang sangat membantu dalam kesuksesan penyelenggaraan berbagai kegiatan besar, terutama dalam pelaksanaan pertemuan KPBP, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Setelah enam tahun bersama MDPI, kini Santri mulai terbiasa menjalin komunikasi dengan berbagai *stakeholder* dan banyak belajar tentang pengelolaan perikanan. Sejak 2022 Santri mulai terlibat dalam program Fisheries seperti proyek *e-logbook* untuk nelayan skala kecil, penempatan observer pada kapal nelayan skala kecil dan program lainnya. Melalui ragam kegiatan perikanan, Santri banyak bertemu dengan nelayan kecil dampingan MDPI dan berbagi cerita tentang perikanan tangkap tuna. Menurutnya, pengalaman ini menjadi hal yang begitu berharga. "Bertemu dengan seluruh *stakeholder* perikanan dari nelayan sampai pemerintah pusat, membuat saya menyadari pentingnya pengumpulan data dan pengelolaan perikanan demi mewujudkan perikanan berkelanjutan. Saya bangga menjadi bagian MDPI yang memberikan kontribusi secara nyata kepada nelayan kecil di Indonesia," ungkapnya.



# PENINGKATAN KAPASITAS: INVESTASI MASA DEPAN ORGANISASI

Di tahun 2022, staf MDPI mengikuti beragam pelatihan yang difasilitasi oleh beberapa instansi terkait berbagai topik, dari perencanaan proyek dan pengelolaan sumber daya manusia, serta isu gender bahkan kesehatan mental. Ke depannya, MDPI akan terus mencari peluang agar staf kami dapat membangun kapasitas berdasarkan kebutuhan individu maupun tim terkait.

**MDPI turut berkomitmen untuk membekali** setiap staf dengan peningkatan kapasitas yang mereka butuhkan demi mencapai keberhasilan dalam menjalankan peran mereka dan mendorong mereka untuk terus mengembangkan pengetahuan serta memperdalam pengalaman. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi. Di tahun 2022, staf MDPI mengikuti berbagai pelatihan eksternal yang difasilitasi oleh instansi seperti Lingkar Madani, Annika Linden Centre, dan International Labour Organization Indonesia. Beberapa topik yang diangkat antara lain: kekerasan berbasis gender, keragaman dan inklusi di tempat kerja, manajemen berbasis hasil dan perencanaan proyek, manajemen dampak dan penyampaian cerita untuk perubahan positif, serta penguatan psikososial di tempat kerja yang bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan manajemen organisasi atau bagian sumber daya manusia guna membangun lingkungan kerja yang kondusif secara mental.

“Pelajaran yang didapatkan dari rangkaian pelatihan ini akan digunakan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menguatkan sistem yang sudah dijalankan di MDPI.”

Ida Ayu Adnyani  
HR & GA Officer MDPI

## LOKAKARYA PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

MDPI mengikuti lokakarya yang difasilitasi oleh International Labour Organization, berfokus pada pentingnya kontribusi pekerja perempuan di wilayah pedesaan, tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap kestabilan hidup keluarga dan komunitas mereka. Bekerja bersama masyarakat pesisir di berbagai desa di Indonesia timur, MDPI pun menyadari pentingnya mengintegrasikan kesetaraan gender dalam pekerjaan yang dijalankan. Melalui pelatihan seperti ini, MDPI terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman gender demi mengupayakan adanya aksi responsif terhadap gender, terlebih khusus dalam dialog sosial, regulasi perusahaan, dan mekanisme kerja sehari-hari. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran organisasi seperti MDPI tentang kekerasan seksual dan potensi tindak lanjut menuju lingkungan kerja yang aman, dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.



## PELATIHAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

Menyelaraskan pekerjaan dan kehidupan sangatlah penting untuk mempertahankan kesehatan, juga meningkatkan hasil dan kepuasan diri di tempat kerja. Memahami keseimbangan kerja tentunya menuntut perhatian, waktu, dan tenaga. Staf yang mempelajari keterampilan hidup ini cenderung menjadi lebih sehat, baik secara mental maupun fisik. Melihat besarnya manfaat *work-life balance* bagi setiap staf, Lingkaran Madani bersama Yayasan Angsamerah berinisiatif mengadakan pelatihan tentang mengelola kehidupan kerja dengan cara yang lebih baik. Bagian Human Resources and General Affairs MDPI turut mengikuti pelatihan ini untuk mendalami bagaimana MDPI sebagai organisasi dapat membangun sistem yang mendukung psikososial dan kesehatan mental sehingga dapat terbangun keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Melalui pelatihan ini, MDPI berharap dapat lebih memahami berbagai hal terkait mekanisme dukungan pengelola sumber daya manusia dalam menciptakan *work-life balance*, termasuk mengenali tanda-tanda kehidupan yang tidak seimbang beserta dampaknya, juga dapat mengupayakan peningkatan moral dan kepuasan karyawan secara keseluruhan.

# MENUJU MDPI SATU DEKADE



**MDPI telah berkiprah** di bidang perikanan skala kecil sejak 2013 dan selama sembilan tahun, MDPI telah bekerja bersama keluarga nelayan skala kecil di Indonesia dan mendorong kegiatan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan sumber daya perikanan di seluruh Indonesia.

Di balik implementasi program yang telah sukses kami jalankan hingga saat ini, terdapat sekumpulan tim handal dengan beragam keahlian, keselarasan visi dengan para mitra kerja, juga donor yang terus berkomitmen untuk mendukung program kerja MDPI.

Sepanjang perjalanan kami, berbagai dampak transformatif nyata tercipta melalui pekerjaan kami untuk masyarakat pesisir dan lingkungan. Kami melihat keluarga nelayan mendapatkan akses yang lebih baik ke berbagai sumber daya, meningkatkan literasi keuangan mereka, mengadopsi praktik perikanan berkelanjutan, dan aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kolaborasi kami dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pemeran industri turut memperkuat upaya kami dan mendorong perubahan positif dalam skala yang lebih besar.

Menuju MDPI Satu Dekade di tahun 2023, kami tetap berkomitmen untuk membangun kemitraan inklusif dan adil, mengedepankan inovasi, dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul, demi memastikan keberlanjutan jangka panjang untuk ekosistem pesisir Indonesia dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami sejauh ini, selama kami terus bertumbuh dan berkembang. Bersama, kita dapat menciptakan masa depan di mana perikanan berkelanjutan dan masyarakat pesisir yang makmur dapat saling berjalan beriringan.

# TIM KERJA MDPI

## STAFF

A. Riza Baroqi  
 Adjie Dharmasatya  
 Agustina Nilam Ratnawati  
 Ako Prasetyo  
 Alief Dharmawan  
 Amrollah  
 Aqidah Nurul Wahidah  
 Ardan Firmansyah  
 Arroyan Suwarno  
 Asis Buton  
 Awaludin Hatapayo  
 Bachori Dhian Pratama  
 Dimas Erlangga  
 Hairul Hadi  
 Hajerah Sufiani  
 Halid Sanahuyo  
 Hasbullah Umaternate  
 Hidayat Daeng Muhamad  
 Hizran Sampalu  
 I Gusti Ayu Anastasia Sukma Putri  
 I Putu Agus Widi Pranata

I Wayan Widian tara  
 Ibrahim Tauhid  
 Ida Ayu Adnyani  
 Iksan Bessy  
 Juliette Ezdra  
 Kai Garcia Neefjes  
 Karel Yerusa  
 La Djamali  
 Marselo Rivaer Manzanaris  
 Marwan Adam  
 Muh. Alwi  
 Muhamad Arman Ahmad  
 Muhammad Novriansyah K.  
 Muhammad Subhan Murid  
 Muhammad Taeran  
 Ni Made Artini  
 Novita Ayu Wulandari  
 Prisillia Morley Loijens  
 Putra Satria Timur  
 Rahman Pelu  
 Ridwan Kamarullah

Sahril  
 Saldi Guntur  
 Santri Dinalhusna  
 Saut Tampubolon  
 Siti Zulaeha  
 Sri Sumiati Jalil  
 Sufira Audila Morotiya  
 Wildan  
 Yasmine Simbolon  
 Yunita Mardiani

## INTERN

Hilmi Mahara Saputra  
 I Gusti Ayu Widya Ari Cahyathi  
 Jovita Larasati Poetri  
 Julfikram Robo  
 Leika Setyaji Riodipoero  
 Ni Wayan Meyla Anjani Mahaswari  
 Puspi Eko Wirantheni  
 Rajab Tasane

# LAPORAN KEUANGAN



- Foundations
- Industry
- Public Funding & Multilateral



- Community Organization
- Fisheries
- Development
- Supply Chain
- Fair Trade
- Operations



Laporan Tahunan 2022  
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia  
[www.mdpi.or.id](http://www.mdpi.or.id)